

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Ruang Terbuka Hijau Yang Tidak Dapat Dipenuhi Oleh DKI Jakarta

Pengadaan Ruang Terbuka Hijau merupakan amanat negara yang dituangkan dalam UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Amanat pengadaan Ruang Terbuka Hijau terlampir dalam Pasal 29 ayat (2) yang mengamanatkan kepada kota di Indonesia untuk dapat memenuhi Ruang Terbuka Hijau sebanyak 30% dari luas kota yang dimiliki, dengan pembagian Ruang Terbuka Hijau Publik 20% dan 10% Privat. UU ini secara tidak langsung mengharuskan atau memberikan kewajiban kepada daerah perkotaan di Indonesia untuk dapat membuka Ruang Terbuka Hijau di lahan-lahan perkotaan daerah otonomi masing-masing. Masalah yang kemudian tercipta dari pengadaan Ruang Terbuka Hijau ini adalah pengadaan lahan atau lahan itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa daerah perkotaan merupakan daerah terbangun yang selalu menampilkan kesibukan aktivitas perekonomian dan gemerlap hutan betonnya.

Permasalahan pengadaan lahan pun menghampiri DKI Jakarta yang merupakan kota Megapolitan dengan pembangunan kota yang sangat cepat, menyisakan krisis lahan untuk dibangun sebagai Ruang Terbuka Hijau. Untuk dapat membangun Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta maka diperlukan anggaran yang tidak sedikit, hal ini dikarenakan harga tanah di Jakarta yang sudah sangat tinggi dan 87% lahan yang ada di Jakarta pun sudah terbangun. Seperti yang disampaikan oleh ketua DPRD DKI Jakarta Komisi D yaitu Ida Mahmudah yang ketika diwawancarai oleh CNN Indonesia menyampaikan untuk dapat mencapai angka 30% RTH di DKI Jakarta merupakan hal yang mustahil untuk

dicapai karena saat ini DKI Jakarta baru mencapai angka 9% dalam ketersediaan RTH.³⁰

Dalam menguraikan permasalahan ini penulis akan menggunakan pendekatan ekologi politik. Ekologi politik dipilih karena memiliki fokus pada lingkungan dan masyarakat serta secara langsung merujuk pada kondisi dari sosial politik yang ada. Selain itu pun pendekatan ini lebih menekankan pada kondisi dan konsekuensi politik atas perubahan lingkungan. Pendekatan ini dipakai karena menyesuaikan pada penulisan penulis yang ingin membahas mengenai latar belakang pemenuhan RTH yang sulit di DKI Jakarta. Selain itu pun dalam ekologi politik ini menciptakan gerakan politik yang bersifat konservasi, Kesehatan lingkungan, dan memperjuangkan keadilan ekologi bagi masyarakat yang kemudian penulis terjemahkan dengan memasukan WALHI sebagai kelompok ekologi politik tersebut.

Teori ekologi politik yang digunakan dalam menguraikan pembahasan dalam sub bab ini adalah teori ekologi politik yang coba menjelaskan pola kerusakan lingkungan yang berasal dari interaksi antara sistem politik dan manusia termasuk didalamnya terdapat kekuatan dan kepentingan dari aktor dalam pengelolaan SDA. Teori politik yang penulis gunakan mengacu pada Timothy Forsyth tentang ekologi politik yang terbagi pada beberapa pendekatan dan Bryant and Bailey untuk memahami ekologi politik.

³⁰ Adi Maulana, "DPRD DKI Sebut Mustahil Jakarta Bisa Penuhi 30 Persen RTH," CNN Indonesia, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211116042306-32-721620/dprd-dki-sebut-mustahil-jakarta-bisa-penuhi-30-persen-rth> (diakses pada 22 Januari 2023).

Berdasarkan pada data yang telah penulis kumpulkan, berikut merupakan hal-hal yang membuat pemerintah DKI Jakarta tidak mampu memenuhi RTH sebesar 30% dan juga bagaimana kemudian pemerintah DKI Jakarta mensiasati agar DKI Jakarta dapat memenuhi 30% Ruang Terbuka Hijau.

5.1.1 Krisis Lahan Hasil Interaksi Kebutuhan Manusia dan Sistem Politik

Permasalahan pokok dalam pengadaan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau adalah lahan yang ada di kawasan tersebut sudah langka atau dapat dikatakan lahan-lahan yang tersedia sudah dimiliki oleh masyarakat maupun developer. Penulis mencoba mengkaji permasalahan ini dengan pendekatan ekologi politik yang dikemukakan oleh Timothy Forsyth yaitu masalah lingkungan sebagai interaksi fenomenologis biofisik, proses kebutuhan manusia, dan sistem politik yang luas. Tentunya dalam pembahasan sub bab ini penulis akan lebih menekankan tentang sistem politik yang ada, karena ketika mengacu pada pemahaman Easton tentang sistem politik ia menjelaskan bahwa sistem politik merupakan pengalokasian nilai yang bersifat memaksa dan mengikat seluruh elemen masyarakat.³¹

Dengan konteks menyediakan Ruang Terbuka Hijau di arena perkotaan seperti DKI Jakarta maka hal ini dapat dipahami dengan melihat bagaimana awal mula DKI Jakarta tumbuh menjadi kota metropolitan lalu berkembang menjadi lebih besar lagi yaitu kota megapolitan. Dimulai pada tahun 1999 dimana ketika pemerintah pusat menerbitkan KepPres No. 114 Tahun 1999

³¹ Nunung Prajarto, "Sistem Sosial, Sistem Politik, Dan Sistem Komunikasi," Sosial, Sistem Politik, Sistem, no. I (1973): hlm. 1.13.

yang memberikan fungsi kawasan yaitu Bogor, Puncak, dan Cianjur (Bopunjur) sebagai kawasan konservasi dalam penyediaan air dan tanah. Lebih dari itu dalam Pasal 3 huruf b menjelaskan bahwa Kawasan Bopunjur sebagai kawasan konservasi air dan tanah menjamin akan tersediannya air dan tanah, kemudian air permukaan dan penanggulangan banjir pada kawasan Bopunjur dan daerah hilir yang termasuk kawasan DKI Jakarta. Hal ini pun selaras dengan pernyataan Riki Putra selaku Kabag Datin Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta yang menyampaikan:

*“Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah tentang kawasan konservasi di bangun di daerah Bopunjur, sedangkan DKI Jakarta merupakan kawasan ekonomi. Sehingga dengan sangat mudah ditemukan bangunan perkantoran dan pusat perbelanjaan di sini”.*³²

Dengan peraturan yang sedemikian rupa seharusnya kawasan Bopunjur ini menjadi arena konservasi. Perubahan haluan peraturan tersebut terjadi karena dalam pengelolaannya tidak ditempatkan oleh pihak yang berwenang yaitu Perum Perhutani sebagaimana amanat dalam KepPres tersebut. Kawasan Bopunjur malah dikelola oleh pihak swasta yang berorientasikan pada ekonomi dan profit sehingga peraturan yang telah diamanatkan dalam KepPres No. 114 Tahun 1999 yaitu kawasan Bopunjur sebagai kawasan konservasi berubah menjadi kawasan rekreasi yang dalam perkembangannya menampilkan dengan jelas adanya degradasi dalam kualitas lingkungan.³³

³² Hasil Wawancara Dengan Riki Putra Selaku Kabag TU Pusat Data dan Informasi Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota DKI Jakarta, Pada 2 Januari 2023 Puku. 10.00 - 11.30 WIB.

³³ Unknow, “Penertiban Di Puncak,” Media Indonesia, 2018, https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1310-penertiban-di-puncak (diakses pada 22 Januari 2023).

Kawasan konservasi yang sudah diamankan menjadi pelindung arena hilir mengalami degradasi lingkungan sehingga tidak dapat lagi melindungi kawasan hilir lagi. Daerah hilir pun mengalami degradasi lingkungan dikarenakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dibuat pun tidak mengindahkan pembangunan berkelanjutan yang memperhitungkan dampak ekologi. Hal ini dapat dengan langsung dilihat dari Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta Periode 2000-2010. Dalam RTRW tersebut dapat dilihat dengan jelas bagaimana Ruang Terbuka Hijau DKI Jakarta hanya tersisa sebanyak 13,94% saja. Angka tersebut jika dibandingkan dengan RTRW DKI Jakarta Periode 1985-2005 yang berada di angka 25,85% maka RTH di DKI Jakarta mengalami penurunan signifikan dalam waktu satu dekade.

Tentunya penurunan jumlah RTH ini memiliki jalan yang panjang, dalam Rencana Induk DKI Jakarta tahun 1965-1985 dimana Jakarta dipimpin oleh Gubernur Soemarno. Target RTH DKI Jakarta bahkan melebihi amanat UU No. 26 Tahun 2007 dimana pada kepemimpinan Soemarno target RTH DKI Jakarta sebesar 37,2%. Jika di konversikan dari luas lahan Jakarta sebesar 66.151 Ha 37,2% nya adalah 24.608 Ha menjadi arena RTH, angka ini saat itu dinilai sangat ideal bagi calon kota Metropolitan.³⁴

Belum sampai habis peraturan tersebut berlaku di tahun 1984 tepatnya dalam Peraturan Umum Tata Ruang (PUTR) periode 1985-2005 penyusutan RTH kembali terjadi, dengan konsep awal memberikan 37,2% lahan Jakarta untuk RTH di peraturan baru ini RTH yang tersisa berada pada angka 25,85%

³⁴ *Ibid.* hlm, 23.

saja. Walaupun sebenarnya angka ini masih dapat dikatakan normal dan masuk kategori ideal untuk sebuah kota, karena RTH yang dimiliki tidak jauh dari angka 30%.³⁵

Dengan melihat penurunan jumlah RTH di atas dapat dipahami bahwa pemerintah DKI Jakarta sebagai pembuat otoritas yang sah di daerah otonominya tidak memanfaatkan sistem politik yang dapat diciptakan untuk kelestarian lingkungan. Laju urbanisasi yang tinggi dan kebijakan tata ruang yang mengkomersialisasi ruang menciptakan ruang di DKI Jakarta kian terkikis untuk dibangun sebagai daerah komersial. sebagaimana yang terlampir dalam RTRW DKI Jakarta untuk periode 2000-2010 yang menyisakan RTH diangka 13.94% saja. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Tempo dijelaskan bahwa dalam pembuatan RTRW untuk periode 2000-2010, tepatnya di tahun 1994 kawasan RTH di Jakarta banyak yang berubah menjadi arena komersial seperti RTH Taman Angrek yang berubah fungsi menjadi mall dan apartemen, RTH Pulomas berganti fungsi menjadi apartemen, dan Pemakaman Blok P di Jakarta Selatan yang merupakan arena terbuka dengan pepohonan rindang beralih fungsi menjadi kantor Walikota.

Pada periode dilakukannya revisi terhadap peraturan tersebut dan pembangunan-pembangunan pada kawasan RTH dilakukan belakangan setelah kawasan RTH berubah fungsi bahkan di beberapa kasus kawasan RTH sudah selesai tahap pembangunannya. Hal ini kemudian yang menciptakan gugatan

³⁵ Pusat Data dan Analisis Tempo. Hlm, 23.

terhadap lahan tersebut tidak dapat dilakukan. Pada kesempatan wawancara bersama WALHI Jakarta, Muhammad Aminullah mengatakan bahwa:

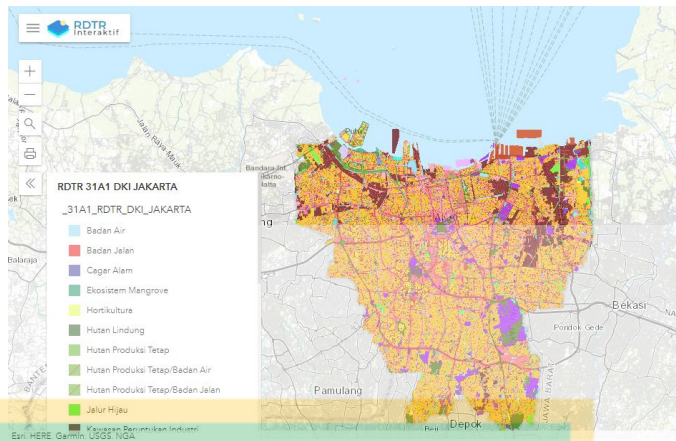
“Berlandaskan pada asas keterlanjuran yang terbentuk di tubuh pembangunan kota Jakarta ini akan menyuburkan pembangunan hutan beton di kawasan DKI Jakarta”.³⁶

Asas keterlanjuran yang dikatakan oleh Muhammad Aminullah tersebut berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh WALHI. Dalam penelitian tersebut tercatat bahwa dalam kurun waktu tahun 2000-2004 saja, Ruang Terbuka Hijau menurun sebanyak 90 Ha per tahunnya.³⁷ Asas keterlanjuran tersebut terbentuk dari program pemerintah yang kerap menyampaikan bahwa “sudah terjadi, bagaimana lagi” penurunan luasan tanah 90 Ha RTH per tahun.

Awal mula permasalahan terjadi karena pembangunan di DKI Jakarta yang tidak mematuhi cetak biru. Dengan perubahan *master plan* yang terjadi beberapa kali pun mencerminkan bagaimana sikap pemerintah daerah yang lebih mengutamakan keinginan dari developer dan pengusaha dibandingkan sistem yang mereka telah tetapkan. Kekacauan pun hadir di tubuh masyarakat, iklim urbanisasi yang menjadikan Jakarta sebagai kota favorit ini menyebabkan pembludakan penduduk. Dengan luas kota terkecil di Indonesia Jakarta menampung lebih dari 10 juta penduduk.

³⁶ Hasil Wawancara Dengan Muhammad Aminullah Selaku Anggota Kampanye Dan Relasi Media WALHI Jakarta.

³⁷ Pusat Data dan Analisis Tempo. Hlm, 25.

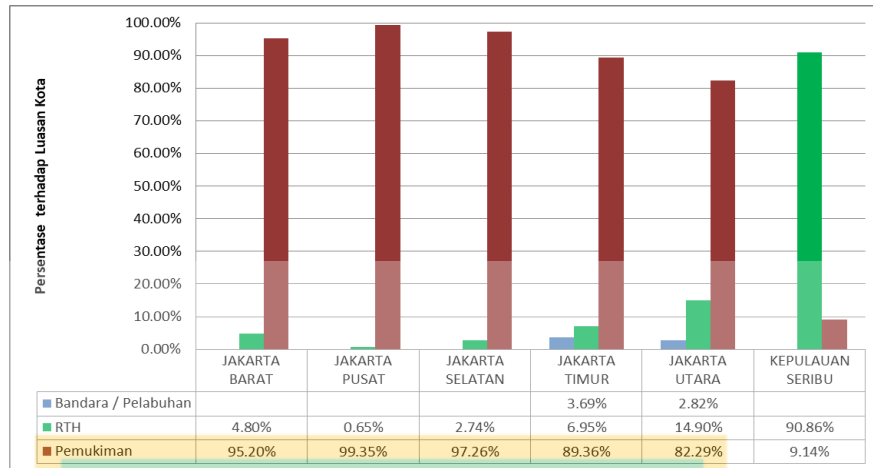


Gambar 5. 1 Peta Rencana Detail Tata Ruang DKI Jakarta
(Sumber: gistaru.atrbpn.go.id)

Berdasarkan pada peta RDTR DKI Jakarta diatas dapat dilihat bahwa pada peta tersebut persebaran warna orens lebih mendominasi dibandingkan warna lainnya. Warna orens tersebut mendeskripsikan kepadatan perumahan penduduk yang hampir mendominasi lahan di DKI Jakarta. Berdasarkan data yang penulis ambil dari *website* tataruang.atrbpn.go.id dijelaskan bahwa pada tahun 2008 lahan terbangun di DKI Jakarta berada di angka 42,941,38 Ha³⁸ kemudian di 2014 melalui BPS tercatat sebanyak 83% lahan di Jakarta telah terbangun.³⁹

³⁸ “RTRW Jakarta 2010-2030 Disetujui,” Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, 2011, <https://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/135> (diakses pada 22 Januari 2023).

³⁹ Wisnu Pudji Pawestri and Nada Ainayya Ridhani, “Dampak Alih Fungsi Lahan,” caribencana.id, 2022, <https://caribencana.id/posts/7y9/dampak-alih-fungsi-lahan-di-jakarta> (diakses pada 22 Januari 2023).



Gambar 5. 2 Presentasi Pembangunan Dalam Luasan Kota
(Sumber: caribencana.id)

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dipahami bahwa pembangunan pemukiman di DKI Jakarta dengan kepadatan nomor satu adalah Jakarta Pusat dengan lahan terbangun sebesar 99,35%. Lalu Jakarta Selatan dengan lahan terbangun sebesar 97,26%, Jakarta Barat dengan lahan terbangun sebesar 95,20%, kemudian Jakarta Timur dengan luas lahan terbangun sebesar 89,36%, dan Jakarta Utara dengan lahan terbangun sebesar 82,29%, serta Kepulauan Seribu yang memiliki lahan terbangun paling rendah di Jakarta yaitu hanya 9,14% saja.⁴⁰

Pertumbuhan penduduk dan penurunan Jumlah Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta merupakan bentuk warisan turun-temurun dari pemerintah sebelumnya. Mengenai pertanggung jawaban atas penurunan jumlah RTH ini pun tidak ada yang ingin disalahkan. Sebagaimana narasumber yang penulis wawancarai dari pihak Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta yang berdasarkan pada SKPD DKI Jakarta merupakan dinas yang berkonsentrasi

⁴⁰ Pawestri and Ridhani, *Loc. Cit.*

dalam pemenuhan RTH di DKI Jakarta. Riki Putra yang secara detail menjelaskan:

“Ketika pemerintah secara nasional menerbitkan UU No. 26 Tahun 2007 dengan mewajibkan kepada setiap kota yang ada di Indonesia untuk memberikan 30% peruntukan lahannya sebagai kawasan RTH dari total luas wilayahnya. Di tahun UU tersebut terbit kondisi DKI Jakarta sudah terbangun menjadi hutan beton maka pemenuhan 30% RTH di DKI Jakarta merupakan kasus yang berat karena jika dipikir secara logika dengan kepadatan sedemikian rupa dan keterbatasan anggaran yang dimiliki untuk melakukan pembebasan lahan, apa jumlah 30% dapat tercapai?”⁴¹

Hal ini pun diperkuat dengan target pemenuhan RTH yang terlampir di RPJMD, berdasarkan data yang penulis dapatkan melalui wawancara dengan narasumber dari Bappeda DKI Jakarta. M. Segara Ihsani selaku staf analis Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup Bappeda menjelaskan:

“Untuk memenuhi kekurangan RTH DKI yaitu hampir 21% karena sisa RTH di DKI Jakarta di tahun 2021 hanya 9,98%.⁴² Jumlah tersebut merupakan masih jumlah campuran antara aset RTH DKI Jakarta dan aset RTH Nasional yang ada di Jakarta, jika mengacu pada aset RTH murni milik Pemprov DKI Jakarta maka jumlahnya hanya 5,182%. Dengan kekurangan sebesar 21% tersebut dan dengan capaian target yang terlampir di RPJMD DKI Jakarta dalam skala pemenuhan pertahun hanya sebesar 0,03% maka akan sangat sulit untuk memenuhi jumlah ideal RTH Perkotaan sebesar 30% di DKI Jakarta”.⁴³

Dengan hal tersebut maka pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta akan sangat sulit ketika masyarakat sendiri tidak memiliki kekhawatiran keadaan ekologi tempat tinggalnya sendiri. Ruang yang terus terbangun tidak

⁴¹ Hasil Wawancara Dengan Riki Putra Selaku Kabag TU Pusat Data Dan Informasi Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota DKI Jakarta, Pada 2 Januari 2023 Puku. 10.00 - 11.30 WIB.

⁴² Lani Diana Wijaya, “Ruang Terbuka Hijau Di Jakarta Belum Sesuai Target, Baru Capai 9 Persen,” metro.tempo.co, 2018, <https://metro.tempo.co/read/1623361/ruang-terbuka-hijau-di-jakarta-belum-sesuai-target-baru-capai-9-persen> (diakses pada 23 Januari 2023).

⁴³ Hasil Wawancara Dengan M. Segara Ihsani, S.T. Selaku Staf Analis Bidang Sarana Prasarana Kota Dan Lingkungan Hidup Bappeda DKI Jakarta. Pada Kamis, 5 Januari 2023.

menyisakan untuk arena resapan dan penghijauan sebagai suplai oksigen bagi keberlangsungan kehidupan perkotaan akan sangat berbahaya. Dengan kasus tersebut Muhammad Aminullah dari pihak WALHI Jakarta pun menyampaikan bahwa:

“Kami juga tengah mempersiapkan audit kepemilikan lahan di Jakarta untuk benar-benar memastikan apakah Jakarta benar-benar tidak mampu mengadakan lahan untuk RTH atau sebaliknya.”⁴⁴

Pengawasan isu pengadaan RTH DKI Jakarta ini akan mulai dilakukan oleh pihak WALHI pada akhir Februari tahun 2023 mendatang. Hal tersebut dikarenakan pihak WALHI memerlukan data-data yang valid untuk dapat memenangkan gugatan terhadap pemerintah Jakarta akan pengadaan Ruang Terbuka Hijau.

5.1.2 Tidak Dijadikan Program Prioritas

Menguraikan pengertian dari program prioritas pihak DPRD DKI Jakarta Komisi D Yuke Yurike menjelaskan bahwa:

“Suatu program dapat masuk dalam frase atau arti prioritas maka didalamnya haruslah memiliki urgensi yang tinggi dalam hal pemenuhan kepentingan masyarakat banyak.”⁴⁵

Dengan hal tersebut maka tidak semua program dapat menjadi prioritas. Untuk menjelaskan fenomena ini penulis menggunakan pendekatan ekologi yang dikemukakan oleh Timothy Forsyth yaitu penyelidikan, kondisi, dan konsekuensi dari perubahan lingkungan. Penggunaan pendekatan ini adalah dengan menentukan spesifikasi lokasi dari perubahan ekologi dimana penulis

⁴⁴ Hasil Wawancara Dengan Muhammad Aminullah Selaku Anggota Kampanye Dan Relasi Media WALHI Jakarta.

⁴⁵ Hasil Wawancara Dengan Hj. Yuke Yurike, S.T., M.M. Selaku Anggota DPRD Komisi D DKI Jakarta.

menentukan kota DKI Jakarta. Kemudian dampak yang kemudian dihasilkan dari hubungan sosial, ekonomi, dan politik dari perubahan lingkungan yang terjadi. Dalam konteks RTH di sini dan mengacu pada tahun kajian RTH dalam skripsi ini diangkat yaitu 2017-2021 maka perubahan lingkungan yang terjadi dalam kurun waktu tersebut adalah terjadinya Pandemi Covid-19 yang berdampak pada keadaan sosial, ekonomi, dan politik DKI Jakarta.

Dalam kesempatan yang penulis dapatkan, penulis secara langsung mewawancarai Anggota DPRD Komisi D yaitu Yuke Yurike. Dalam kesempatan wawancara tersebut ia menjelaskan bahwa di tahun-tahun pandemi Covid-19 banyak anggaran dari program-program DKI Jakarta yang dialihfungsikan pada program prioritas Covid-19. Yuke Yurike menjelaskan bahwa dana tersebut dialih fungsikan untuk kebutuhan medis dan penguatan ekonomi warga Jakarta.

Atas hal tersebut anggaran untuk program RTH pun banyak terpotong bahkan jauh sebelum Pandemi Covid-19 pun anggaran yang dikeluarkan oleh Pemprov untuk RTH sudah sering terpotong. Lebih tepatnya pada tahun 2019 pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD Jakarta menyepakati pemotongan anggaran RTH tahun 2020 dari Rp 1,08 triliun hanya menjadi Rp 700 miliar saja.⁴⁶

Sejalan dengan pernyataan Yuke Yurike, M. Segara Ihsani dari Bappeda Jakarta pun menyampaikan bahwa tahun-tahun Covid-19 mengacaukan

⁴⁶ Rizzah Aulifia, "Dilema RTH Dalam Kontestasi Tripartit Jakarta," pinterpolitik.com, 2021, <https://www.pinterpolitik.com/ruang-publik/dilema-rth-dalam-kontestasi-tripartit-jakarta/> (diakses pada 30, Januari 2023).

perencanaan Pemprov akan program RTH. Pembangunan-pembangunan yang dilakukan di tengah pandemi Covid-19 pun ditujukan sepenuhnya pada pembangunan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta seperti pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19. Sehingga pembangunan Ruang Terbuka Hijau di periode 2017-2021 hanya melanjutkan program RTH di kepemimpinan sebelumnya, yaitu pada periode Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dengan kebijakan diberi nama dengan RPTRA dan di pemerintahan Anies Baswedan nama program diganti dengan nama Taman Maju Bersama.

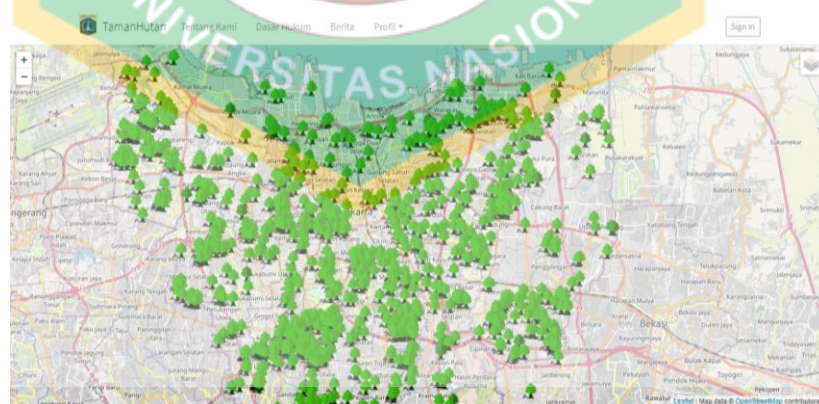
Dalam program Taman Maju Bersama ini pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta. Membangun konsep Ruang Terbuka Hijau dalam bentuk taman dengan fasilitas- fasilitas yang ada di dalamnya menyesuaikan pada kebutuhan masyarakat sekitar taman yang dibangun. Dalam membangun taman ini pemerintah melakukan kolaborasi dengan masyarakat sekitar dalam hal perencanaan, pengembangan, dan penggunaannya. Taman Maju Bersama ini memiliki fungsi ekologis dalam menjaga kualitas lingkungan kota seperti ekosistem, meningkatkan daya dukung tanah, arena konservasi air, ruang mitigasi bencana, dan peningkatan kualitas kota, serta penambah estetika kota.



Gambar 5. 3 Taman Maju Bersama Cilangkap

(Sumber: Megapolitan.Kompas.com)

Fasilitas-fasilitas yang ada di TMB pun berbeda-beda di setiap zamannya karena menyesuaikan pada kebutuhan masyarakat sekitar. Taman Maju Bersama ini selain memiliki fasilitas umum seperti perpustakaan, taman *skateboard*, tempat bermain anak-anak, dan arena olahraga. Taman Maju Bersama ini pun ditanami berbagai jenis macam tanaman yang berfungsi secara ekologi. Dengan rincian 428 taman & 48 hutan kota yang berhasil direvitalisasi, adapun rincian persebaran kawasan pembangunan 100 Taman Maju Bersama yang dibangun dari tahun 2018-2022 adalah Jakarta Utara sebanyak 17 TMB, Jakarta Barat 17 TMB, Jakarta Selatan 28 TMB, dan Jakarta Timur 38 TMB.



Gambar 5. 4 Sebaran TMB di DKI Jakarta

(Sumber: <https://pertamananpemakaman.jakarta.go.id/>)

Pembangunan Ruang Terbuka Hijau dengan konsep TMB tersebut merupakan suatu terobosan baru yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta yang melakukan pemanfaatan ruang dengan memperhitungkan nilai ekologi bagi masyarakat sekitar. Namun, pembangunan 100 TMB tersebut belum dapat menaikkan jumlah RTH DKI Jakarta. Atas fenomena tersebut penulis pun menanyakan hal ini kepada pihak DPRD DKI Jakarta Komisi D yaitu Yuke Yurike tentang bagaimana populisnya kebijakan ini. Yuke Yurike menjelaskan bahwa:

“Penempatan TMB yang berada di tengah-tengah masyarakat ekonomi menengah yang mengidamkan ruang interaksi dan arena yang memiliki fasilitas yang cukup lengkap karena menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa kebijakan ini cukup populis, karena melihat konsep dari TMB sendiri yang sangat dasar, namun penempatan TMB di masyarakat yang tinggal dalam kawasan Jakarta yang pengap dapat menciptakan hal yang sangat wah. Sedangkan jika konsep TMB dibangun di daerah pemukiman elit dan mewah TMB bukan apa-apa, hanya sebatas taman pemanis saja.”⁴⁷

Atas pernyataan tersebut pun DPRD tidak merasa keberatan selagi program yang dikeluarkan dapat bermanfaat kepada masyarakat.

Angka 100 yang ditampilkan dalam konsep TMB pun dapat memberikan kesan yang sangat baik untuk akhir kepemimpinan Anies. Di sisi lain pihak WALHI Jakarta melihat pembangunan taman yang marak tersebut tidak memperhitungkan jumlah semen dan beton yang melapisi taman tersebut. Karena diperuntukan sebagai taman dan Ruang Terbuka Hijau seharusnya proposisi tanah sebagai media penyerap air haruslah diperhitungkan. Karena

⁴⁷ Hasil Wawancara Dengan Hj. Yuke Yurike, S.T., M.M. Selaku Anggota DPRD Komisi D DKI Jakarta.

banyak dari TMB yang dibangun dengan komposisi semen di permukaan tanah yang cukup banyak atau dapat dipahami dengan singkat bahwa kebanyakan TMB lebih menonjolkan sisi estetik dari sebuah taman bukan penampilan ekologi fungsi alami dari taman itu sendiri.

Dengan pembahasan diatas dapat dipahami bahwa DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia dan sebagai daerah otonomi memiliki hal-hal yang menarik untuk didapatkan. Dalam penetapan program prioritas pun pemerintah akan lebih mengedepankan program-program yang memiliki profit. Seperti halnya pembangunan transportasi dan ekonomi, yang mana dalam pembangunan tersebut pun akan menaikan atensi warga terhadap akseptabilitas seorang politisi. Penerbitan kebijakan yang termaktub dalam Peraturan Gubernur No. 118 Tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang dalam rangka mempercepat perizinan pembangunan Gedung dan mendorong perekonomian dari sektor properti. Dengan diterbitkannya peraturan ini pemerintah secara tidak langsung memberikan penyederhanaan izin yang seharusnya 365 hari menjadi hanya 57 hari kerja saja. Dalam kondisi covid-19 pemerintah meyakini kebijakan ini mampu membuka lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan daerah, dan penarikan investor.⁴⁸

Kemudian dalam kebijakan yang memiliki fungsi ekologi, selalu saja dijadikan kebijakan populis. Pembangunan 100 TMB jika melihat jumlahnya memang sangat banyak, namun jika diukur mengenai substansi dari tanaman

⁴⁸ Aulifia, "Dilema RTH Dalam Kontestasi Tripartit Jakarta."

yang ditanam dan juga persentase TMB tersebut memberikan fungsi ekologi terhadap masyarakat tidak disampaikan oleh pemerintah.

Hal ini yang kemudian menciptakan pola pikir di masyarakat bahwa taman-taman yang dibangun oleh pemerintah DKI Jakarta hanya sebatas taman yang diperuntukan sebagai tempat bersosialisasi dan estetika yang dapat dinikmati. Sehingga rasa untuk menjaga taman tersebut untuk keberlangsungan lingkungan yang lebih sehat tidak tersampaikan. Hal ini pun dibenarkan oleh pihak WALHI Jakarta yang diwakili oleh Muhammad Aminullah yang menyampaikan mengenai pengertian masyarakat akan RTH

“Framing dari pemerintah akan RTH yang menggambarkan RTH dibuat hanya untuk estetika kota saja, padahal fungsi dari RTH lebih dari itu. Dalam pembangunan RTH ada mekanismenya seperti ukuran betonnya seberapa, tanahnya berapa, namun RTH yang saat ini dibangun lebih ke arah rekreasi publik sehingga masyarakat pun memandang bahwa fungsi RTH hanya sebagai taman dan tempat rekreasi. Padahal RTH memiliki fungsi lain yang bermanfaat untuk masyarakat”⁴⁹

Pernyataan Muhammad Aminullah tersebut dapat dianalisis dengan melihat wawancara antara Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta dengan masyarakat sekitar TMB.

⁴⁹ Hasil Wawancara Dengan Muhammad Aminullah Selaku Anggota Kampanye Dan Relasi Media WALHI Jakarta.



Gambar 5. 5 Wawancara Dinas Taman Hutan Kota Dengan Masyarakat Pengunjung TMB

(Sumber: Youtube Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta)

Berdasarkan pada video dengan judul “Kata Teman Taman: Tentang Hadirnya Taman Maju Bersama (TMB) di Jakarta!” Menampilkan beberapa warga yang sedang mengunjungi taman untuk diminta *review* mengenai kehadiran TMB. Banyak mereka menjawab bahwa kehadiran TMB merupakan tempat rekreasi murah meriah, tempat bermain anak dengan fasilitas yang lengkap, dan bagus untuk hiburan.

Banyak masyarakat yang hadir dengan sigap dan pede menjelaskan keuntungan yang mereka dapatkan dari hadirnya TMB ini sebagai ruang interaksi. Namun, tidak ada dari mereka yang menyampaikan bagaimana fungsi ekologi dari kehadiran TMB tersebut. Dengan hal tersebut maka diperlukan peran pemerintah untuk memberikan penyuluhan lebih tentang fungsi ekologi dari taman tersebut.

5.1.3 Pembaharuan Kebijakan Ruang Terbuka Hijau

Ketidakmampuan pengadaan Ruang Terbuka Hijau oleh Pemprov DKI Jakarta dan kota-kota lainnya di Indonesia adalah mengenai pengadaan lahan itu sendiri untuk dijadikan kawasan RTH. Jumlah 30% sangat sulit dicapai

karena pertumbuhan kota yang pesat dan juga kepentingan ekonomi yang menguasai lahan menciptakan kesulitan tersebut. Sehingga pemerintah melalui Menteri Agraria dan Tata Ruang menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Maka dengan hal tersebut penjelasan dalam sub bab ini penulis landasi dari pendekatan ekologi politik Bryant and Bailey yang menekankan pada kepentingan akan tindakan aktor dalam memahami konflik politik dan ekologi. Konflik politik di sini diartikan sebagai perbedaan kepentingan dan juga tujuan politis dari individu maupun kelompok. Perbedaan kepentingan kemudian muncul dari kalangan pemerintah dan NGO Lingkungan yang satu sama lain memiliki tujuan politis masing-masing. Tujuan dari pemerintah sendiri adalah memanfaatkan aset daerah yang ada untuk menciptakan profit sedangkan tujuan dari NGO lingkungan adalah menciptakan keadilan ekologi dalam kehidupan bernegara.

Permen ATR_KBPN No. 14 Tahun 2022 ini dapat dikatakan sebagai penyederhanaan pada aturan sebelumnya dalam pedoman penyediaan Ruang Terbuka Hijau. Alasan kuat yang melatar belakangi terbentuknya Pemen ini adalah kesulitan serta kendala yang dialami oleh Pemerintah Daerah dalam mengadakan 20% peruntukan lahan sebagai Ruang Terbuka Hijau, maka diperlukan suatu peraturan baru yang menjadi pedoman penyediaan Ruang

Terbuka Hijau. Selain itu pun dalam upaya mitigasi perubahan iklim serta dalam rangka mencapai misi nol emisi karbon pemerintah daerah memiliki kewajiban menyediakan Ruang Terbuka Hijau yang berkualitas.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh informan penulis yaitu M. Segara Ihsani dari Bappeda ia menjelaskan

“Permen ini akan memberikan perhitungan baru dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau arena perkotaan di Indonesia. Dalam kasus Jakarta yang memiliki kendala besar terhadap pengadaan lahan sebesar 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat, dengan pembaharuan peraturan pengadaan RTH ini makan akan menjadi angin segar.”⁵⁰

Dalam memenuhi kekurangan RTH DKI Jakarta yang berada di angka 10-20% merupakan hal yang sangat sulit karena target pertahun saja untuk pembebasan lahan hanya sebesar 0,03%, dan pada periode 2017-2021 yang terkena pandemi mengakibatkan ketersediaan anggaran DKI Jakarta menurun. Hal lainnya yang menjadi faktor kesulitan Pemerintah DKI memenuhi RTH sebanyak 30% adalah:

- 1) Harga tanah DKI yang sangat mahal, jika harga tanah di DKI terjangkau seperti daerah lain maka akan sangat mampu DKI dengan hanya APBD melakukan pembebasan lahan untuk RTH.
- 2) Ketersediaan tanah di Jakarta yang sulit dicari, karena kepadatan penduduk di Jakarta yang sangat padat sehingga sangat sulit mencari lahan kosong.

⁵⁰ Hasil Wawancara Dengan M. Segara Ihsani, S.T. Selaku Staf Analis Bidang Sarana Prasarana Kota Dan Lingkungan Hidup Bappeda DKI Jakarta. Pada Kamis, 5 Januari 2023.

- 3) APBD Jakarta akan habis jika terus mengejar pemenuhan RTH sehingga program lainnya seperti banjir, dan kemacetan tidak dapat berjalan karena anggaran sudah habis.

Dalam Wawancara tersebut M. Segara Ihsani menjelaskan jika terus menggunakan peraturan lama tentang pengadaan Ruang Terbuka Hijau maka bisa saja Jakarta berhenti di angka 10/11% dalam hal penyanggupan pengadaan Ruang Terbuka Hijau. Maka dengan dikeluarkan Permen ATR_KBPN No. 14 Tahun 2022 terbentuk pedoman baru dalam hal penghitungan dan pengakuan mengenai RTH. Secara garis besar Permen ini mengatur secara teknis mengenai perencanaan dan pembentukan peta yang diperuntukan sebagai pedoman bagi kota-kota yang sedang membangun RTH di Indonesia. Rencana dan mekanisme baru pun sudah terancang melalui Permen ini.

Inovasi baru dalam Permen ini adalah Indeks Hijau Biru Indonesia yang merupakan cara baru dalam menghitung rasio RTH. Dalam konsep ini Ruang Terbuka Hijau akan memberlakukan perhitungan dari mulai luasan tanah dan jenis vegetasi yang ditanam di dalamnya. Dengan memberlakukan pembobotan terhadap setiap vegetasi yang ada di dalam RTH pun akan menghasilkan nilai yang berbeda pada setiap RTH yang ada di Indonesia. Misalnya RTH yang hanya terisi vegetasi hamparan rumput yang luas tentunya presentasi nilainya akan berbeda dengan RTH dengan vegetasi pepohonan yang dapat menyerap karbon dan memberikan oksigen yang besar terhadap lingkungan. Kemudian Ruang Terbuka Hijau yang didalamnya terintegrasi hijau biru yaitu Ruang Terbuka Hijau yang memiliki ekosistem dan kolam bertensi akan diberikan

bobot berbeda juga dengan RTH yang hanya memiliki vegetasi tumbuhan. Dengan ini penghitungan RTH akan menggunakan pembobotan, pembobotan merupakan suatu inovasi untuk mengatasi ketidakmampuan Jakarta untuk mencapai 30% RTH.

Paradigma baru pun tercipta melalui Permen ATRKBP No. 14 Tahun 2022 dimana yang awalnya Ruang Terbuka Hijau hanya dihitung berdasarkan hanya pada luasannya saja dan tidak memperhitungkan vegetasi yang ada di dalamnya. Kemudian melalui Permen ATR_KBPN No. 14 Tahun 2022 ini semua hal dalam RTH diperhitungkan mulai dari sisi ekologis dan ekosistem yang berkesinambungan di dalamnya. Hal tersebut direalisasikan melalui Indeks Hijau Biru Indonesia yang memberikan bobot pada masing-masing elemen. Bahkan untuk zona biru pun memiliki elemen tersendiri karena memberikan fungsi ekologis seperti RTH.

Adapun perhitungan baru dari terobosan ini adalah penghitungan RTH yang berada di Gedung dan rumah warga seperti Vertical garden, tanaman di dalam pot, dan badan air. Namun dengan perhitungan dan standar fungsi pemanfaatan RTH itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk dapat mengejar ketertinggalan yang ada. Pemerintah dengan peraturan ini melakukan pemanfaatan terhadap luas lahan yang seminimal mungkin namun dapat memberikan dampak ekologis semaksimal mungkin.



Gambar 5. 6 Pemanfaatan Ruang di Rumah Warga

(Sumber: dokumentasi pribadi)



Gambar 5. 7 Pemanfaatan Ruang di Sempadan Jalan

(Sumber: dokumentasi pribadi)



Gambar 5. 8 Green Building & Vertical Garden

(Sumber: internet)

Dengan mengeluarkan kebijakan baru aktor disini yaitu pemerintah mencoba memahami permasalahan terhadap penyediaan RTH. Di banyak kota dan kabupaten di Indonesia yang sudah mulai bertumbuh dengan ketersediaan lahan yang terbatas maka diberikan sebuah solusi untuk hal tersebut dengan perhitungan/pembobotan pada vegetasi yang ada di dalam suatu RTH serta pemanfaatan lahan semaksimal mungkin yang dimiliki oleh perusahaan

maupun masyarakat yang ditanami tanaman. Angka-angka tersebut yang kemudian terakumulatif menjadi nilai 30% RTH. UU ini pun memfasilitasi kepentingan pemerintah tentang kewajibannya memenuhi RTH sebanyak 30% yang tidak melanggar hak-hak dari masyarakat mengenai perampasan lahan yang kemudian dibangun sebagai RTH.

Atas kebijakan baru tersebut tentunya WALHI berada di pihak yang berseberangan, karena jika memahami secara khusus dari fungsi Ruang Terbuka Hijau ini tidak hanya melihat bagaimana hijaunya bangunan atau rumah namun. Ruang Terbuka Hijau pun memiliki standar sampai pada pemenuhan standar tersebut dapat dikatakan sebagai RTH. Muhammad Aminullah menjelaskan

*"Vertical garden yang ada di Gedung/di rumah sudah termasuk pada RTH padahal hal tersebut hanya sebuah pemanis saja walaupun dapat menyerap polusi udara tetapi di fungsi penyerap air hujan tidak dapat dilakukan. Dengan hal tersebut pemerintah membangun framing di masyarakat bahwa RTH sangat mudah diaplikasikan sehingga pemahaman masyarakat akan pentingnya RTH pun tidak diketahui oleh masyarakat."*⁵¹

5.2 Peran Pengawasan WALHI Jakarta Dalam Pengadaan RTH DKI Jakarta

Dalam memahami gerakan sosial diperlukan batasan yang menjadi acuan dalam memahami definisi dari gerakan sosial itu sendiri. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sujatmiko bahwa gerakan sosial merupakan aksi yang dilakukan secara kolektif yang memiliki orientasi konflik yang jelas dalam

⁵¹ Hasil Wawancara Dengan Muhammad Aminullah Selaku Anggota Kampanye Dan Relasi Media WALHI Jakarta.

menghadapi lawan sosial maupun politik tertentu. Konteks dari gerakan sosial baru ini berjalan dengan menjalin jaringan lintas kelembagaan yang kuat dengan aktor-aktor yang diciptakan rasa solidaritas yang tinggi serta membawa identitas kolektif yang kuat lebih dari pada ikatan dalam koalisi serta kampanye bersama.⁵²

Jenis gerakan sosial kemudian dibedakan pada isu yang diangkat dalam materi gerakannya, misalnya *Old Social Movement* membawa materi gerakan seputar petani maupun buruh dan *New Social Movement* membawa materi mengenai ide serta nilai contoh gerakannya adalah gerakan feminisme dan lingkungan. Dengan ini WALHI masuk pada golongan *New Social Movement* dengan membawa ide dan nilai lingkungan pada setiap gerakannya. Kelompok ini pun kemudian diidentifikasi sebagai ORNOP (Organisasi Non Pemerintah) dengan membawa fokus dan konsisten terhadap suatu masalah dalam perubahan sosial. Di tahun 1980-an berdasarkan pada pemetaan partisipasi pembangunan dalam konteks Indonesia oleh Agust. Dijelaskan bahwa NGO merupakan badan yang mempromosikan mekanisme kebijakan dari bawah ke atas dengan melayangkan kritik dan alternatif dengan bentuk *top down* (meliputi sektor modern dan dominasi negara). Selain itu pun NGO memobilisasi partisipasi publik dengan proyek multinasional.⁵³

Dengan hal-hal tersebut kemudian penulis merumuskan pembahasan mengenai peran WALHI dalam hal pengawasan kepada pemerintah dalam pengadaan Ruang Terbuka Hijau ini dengan menggunakan tiga fokus

⁵² Oman Sukmana, "Konsep Dan Teori Gerakan Sosial," Intrans Publishing, 2016, hlm, 237.

⁵³ T. B.Massa Djafar, Hari Zamharir, and Firdaus Syam, "Participation Deficit in Local Governance in Contemporary Indonesia," International Journal of Innovation, Creativity and Change, 2019.

pembahasan yaitu ideologi gerakan, peluang politik, dan struktur mobilisasi yang dilakukan oleh WALHI. Dalam menjelaskannya penulis dibantu oleh formulasi gerakan sosial baru Pichardo yang diformulasikan oleh Singh yaitu Ideologi dan Tujuan teori gerakan sosial. Kemudian teori McAdam, McCarthy, dan Zald yaitu Peluang Politik yang terbagi pada *organization strength*, *cognitive liberation*, dan *political oportunitis*, serta struktur mobilisasi.

5.2.1 Ideologi dan Tujuan Gerakan WALHI Jakarta

Gerakan Sosial Baru merupakan gerakan sosial yang dapat dipahami sebagai tantangan kolektif yang dijalankan sejumlah orang dengan tujuan yang sama dalam melakukan interaksi yang berkelanjutan dengan kelompok elit dan penguasa. Ideologi sendiri terbentuk untuk dapat menanamkan keselarasan dalam hal keyakinan yang dianut secara bersama, menyampaikan nilai-nilai yang diperjuangkan, memberikan informasi tentang hal-hal yang harus dijalankan. Dengan tujuan dari ideologi ini nantinya terealisasikan pada tujuan yang akan mereka capai. Karl Marx sendiri menjabarkan ideologi sebagai alat dalam mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama di masyarakat. Atau dalam artian lain Karl Marx mengartikan ideologi sebagai satu cara pandang dalam hidup yang dikembangkan dengan berdasarkan pada kepentingan golongan ataupun kelas sosial baik dalam bidang politik maupun sosial.⁵⁴

WALHI sebagai gerakan sosial baru bergerak secara berkelanjutan dari tahun 1980 sampai saat ini, untuk dapat terus berjalan WALHI mendasari

⁵⁴ Fachri Zulfikar, "Apa Saja Fungsi Ideologi? Begini Penjelasan Lengkap Beserta Tipenya," detik.com, 2021, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5620790/apa-saja-fungsi-ideologi-begini-penjelasan-lengkap-beserta-tipenya> (diakses pada 24 Januari 2023).

gerakannya pada suatu ideologi untuk dapat menciptakan keselarasan dan tujuan yang sama dari setiap kegiatan yang dilakukannya. Ideologi yang diusung oleh WALHI Jakarta berdasarkan hasil wawancara penulis dengan anggota WALHI Jakarta yaitu:

“Pemenuhan lingkungan hidup yang berkeadilan, gerakan-gerakan ekologi WALHI Jakarta bertujuan untuk menciptakan keadilan ekologi bagi masyarakat Jakarta. Keadilan ekologi didasari pada hak-hak masyarakat yang terpenuhi. Dalam konteks Ruang Terbuka Hijau di sini keadilan ekologi ditinjau dari bagaimana masyarakat dapat mengakses lingkungan yang baik, sehat, dan adil. Adil dilihat dari aspek bagaimana pemerintah harus menggunakan cara yang legal tidak memaksa atau mengambil hak dari warga untuk menegakkan keadilan ekologi.”⁵⁵

Lebih lanjutnya mengenai gerakan spesifik WALHI Jakarta dalam pengadaan Ruang Terbuka Hijau di Jakarta, Muhammad Aminullah menyampaikan:

“Isu Ruang Terbuka Hijau memang belum WALHI kaji secara konstan, hal ini dikarenakan keterbukaan data RTH yang sangat sulit didapatkan. Sehingga banyak fokus dari gerakan RTH WALHI ini menyusup di gerakan lainnya seperti gerakan polusi udara dan Jakarta butuh pohon bukan beton”⁵⁶

Dengan hal tersebut banyak gerakan RTH yang dijalankan WALHI masih samar dan banyak dipadukan dengan gerakan lainnya seperti gerakan polusi udara dan gerakan reaksioner terhadap tindakan pemerintah yang menebang pohon di kawasan RTH Monas *“Jakarta Butuh Pohon Bukan Beton”*. Ideologi yang ditanamkan oleh WALHI Jakarta ini pun menyesuaikan

⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan Muhammad Aminullah Selaku Anggota Kampanye Dan Relasi Media WALHI Jakarta. Pada Rabu 14 Desember 2022.

⁵⁶ “Hasil Wawancara Dengan Muhammad Aminullah Selaku Anggota Kampanye Dan Relasi Media WALHI Jakarta.”

pada prinsip terbentuknya WALHI pertama kali yaitu menjadi ORNOP/NGO yang independen dengan tidak terkait dengan pemerintahan. Asas yang dibangun oleh WALHI yaitu kemandirian, Kerjasama tanpa adanya ikatan, dan asas bekerja secara nyata dan bersama sama untuk masyarakat ini yang kemudian menciptakan ideologi tersebut.

Dari tahun 1980 sampai saat ini pun WALHI masih konsisten dengan prinsip awal pembentukannya. Walaupun dinamika sosial politik di Indonesia yang berubah dari yang bercirikan otoriter di era Orde Baru sampai Reformasi WALHI tetap berpegang teguh sebagai kelompok penekan yang independen. Muhammad Aminullah pun menyatakan:

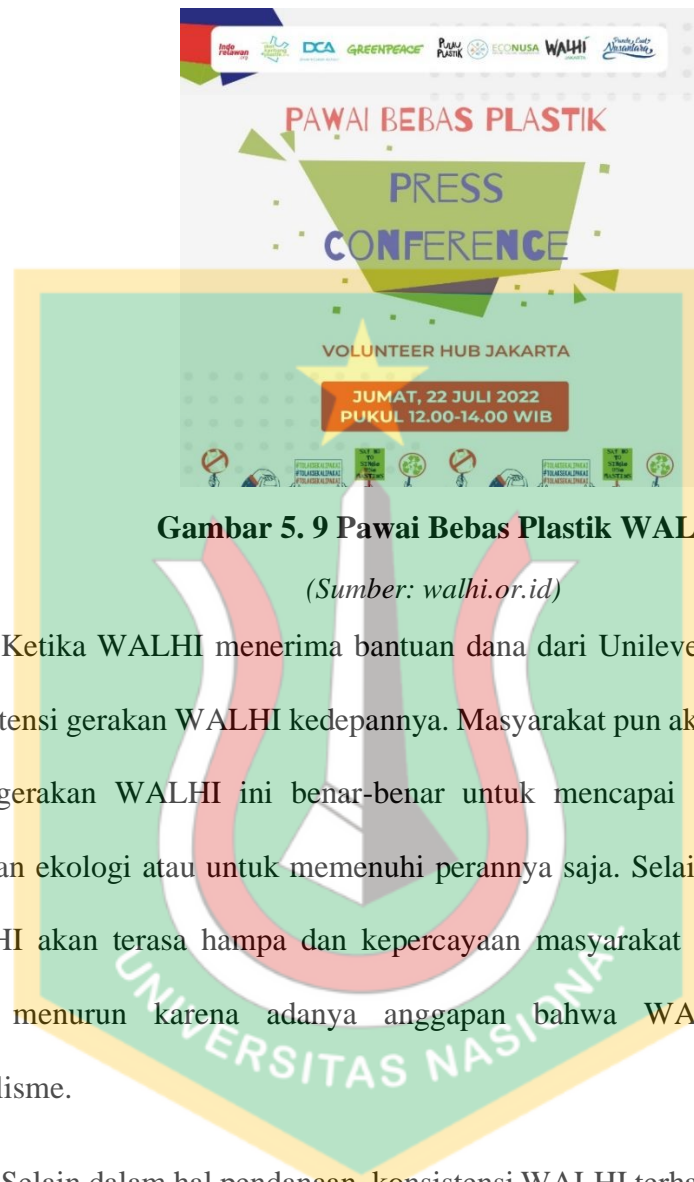
*“Pendanaan WALHI yang bersifat independen dan melakukan check and recheck secara komprehensif tentang latar belakang donator. Terdapat instansi yang WALHI blacklist yaitu seluruh perusahaan dengan jenis apapun dan partai politik. Dana pemerintah WALHI menerima bantuan tersebut namun WALHI akan melakukan riset tentang dana tersebut namun kebanyakan kasus WALHI tidak menerima dana tersebut”.*⁵⁷

Bentuk konsisten dalam ideologi tersebut pun sampai pada tahap pendanaan karena ideologi tersebut diciptakan atau terbentuk untuk membentuk citra WALHI dan menciptakan rasa percaya dari masyarakat kepada WALHI. Selain itu pun WALHI menghindari blunder daripada gerakan ekologi yang mereka bawakan. Misalnya seperti ketika pihak WALHI Jakarta menerima bantuan dana dari Perusahaan Unilever. Perusahaan tersebut merupakan salah satu penyumbang sampah plastik terbesar yang mencemari sungai⁵⁸ dengan

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Iqbal Muhtarom, “Sampah Sachet Unilever Paling Banyak Mencemari Sungai,” tempo.com, 2022,

kemasan produknya. Sedangkan WALHI Jakarta memiliki gerakan pawai bebas plastik.



Gambar 5. 9 Pawai Bebas Plastik WALHI

(Sumber: walhi.or.id)

Ketika WALHI menerima bantuan dana dari Unilever, lalu bagaimana konsistensi gerakan WALHI kedepannya. Masyarakat pun akan bertanya-tanya akan gerakan WALHI ini benar-benar untuk mencapai ideologinya yaitu keadilan ekologi atau untuk memenuhi perannya saja. Selain itu pun gerakan WALHI akan terasa hampa dan kepercayaan masyarakat terhadap WALHI dapat menurun karena adanya anggapan bahwa WALHI antek-antek kapitalisme.

Selain dalam hal pendanaan, konsistensi WALHI terhadap ideologi yang dibawanya adalah dengan membuat kertas posisi. Kertas posisi ini merupakan bentuk pemberian dukungan terhadap suatu isu. Lebih jauhnya kertas posisi ini merupakan bentuk pernyataan sikap yang dituangkan dalam kertas. Dengan

<https://metro.tempo.co/read/1602299/sampah-sachet-unilever-paling-banyak-mencemari-sungai-sungai-di-indonesia> (diakses pada 2 Februari 2023).

kertas posisi tersebut menunjukkan posisi WALHI dimana posisi WALHI dan bagaimana kemudian aksi yang akan dijalankan oleh WALHI lebih jauhnya.



Gambar 5. 10 Kertas Posisi WALHI

(Sumber: walhi.or.id)

5.2.2 Peluang Politik

Dalam menjelaskan secara mendalam mengenai peran pengawasan WALHI dalam pengadaan Ruang Terbuka Hijau oleh Pemprov DKI Jakarta maka penulis menggunakan teori gerakan sosial dari McAdam, McCarthy, dan Zald yaitu peluang politik. Dalam peluang politik ini terdapat tiga faktor keberhasilan dalam mendorong keberhasilan dari gerakan sosial yaitu dengan cara *Organization Strength*, *Cognitive Liberation*, dan *Political Opportunities* berikut merupakan penjelasannya.

1. *Organization Strength*

Dalam faktor ini akan menjelaskan bagaimana kelompok dari gerakan sosial mampu membentuk organisasi yang kemudian mampu membangun *solidarity incentive*, jaringan komunikasi, dan pemimpin yang diakui. Keberhasilan suatu gerakan melalui faktor ini dijelaskan dengan bagaimana organisasi tersebut memiliki struktur yang jelas, dan gerakan yang terarah.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia merupakan gerakan sosial yang di awal kemunculannya secara tidak langsung difasilitasi oleh pemerintah DKI Jakarta kepemimpinan Gubernur Tjokropranolo dimana saat itu sahabatnya Emil Salim, Bedjo Rahardjo, Erna Witoelar, Ir. Rio Rahwartono (LIPI). Memiliki konsep untuk membuat kerjasama antara NGO dan pemerintah mewujudkan lingkungan yang baik dengan cara membantu program pemerintah di bidang lingkungan.

Singkatnya pemilihan nama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia sendiri dilandasi dengan kemandirian dari organisasi ini yang tidak terikat pada elemen politik seperti partai. Asas organisasi non-pemerintah pun dilandasi pada kemandirian, kerjasama tanpa ikatan, dan bekerja nyata bersama untuk masyarakat.⁵⁹ Sembilan anggota presidium pembentukan WALHI saat itu pun menyadari bahwa intervensi pemerintah dalam NGO merupakan iklim demokrasi yang ada di Indonesia sehingga perlu adanya kepekaan yang tinggi tentang bagaimana masyarakat memberikan persepsinya pada WALHI. Dengan hal tersebut para aktivis yang hadir dalam pertemuan ini mendeklarasikan WALHI sebagai NGO/ORNOP dengan bentuk forum LSM Lingkungan yang keanggotaannya bersifat egaliter dan logar dan juga berperan sebagai forum komunikasi.

⁵⁹ WALHI, “*Siapa Kita*,” walhijakarta.org, n.d., <https://walhijakarta.org/siapa-kita/> (diakses pada, 4 Februari 2023).

Sebagai sebuah forum WALHI memiliki kekuatan yang cukup besar yang pertumbuhannya terus berkembang secara bertahap. Dimulai dari tahun 1983 dimana anggota Lembaga WALHI sudah mencapai 350 lembaga. Di awal gerakannya WALHI pun memperkenalkan gerakannya pada seluruh elemen pemerintah, perusahaan, dan masyarakat yang meliputi pers, mahasiswa, artis, dan lain sebagainya.

WALHI pun mendapatkan legitimasinya sebagai representasi NGO Lingkungan dengan cakupan seluruh Indonesia serta DPR pun mengundang WALHI dalam agenda dengar pendapat dalam pembahasan-pembahasan UU Lingkungan Hidup.⁶⁰

Pada periode 1986 – 1989 WALHI diarahkan sebagai *Environmental Awareness Raising* pada kalangan LSM dan Masyarakat luas hal tersebut pun terus berlanjut dengan WALHI yang menjalankan program-program advokasinya. Kampanye yang dilakukan WALHI pun tidak hanya mendapatkan legitimasi dan dukungan dari pemerintah dan masyarakat melainkan media massa pun mulai memberikan dukungan dengan menempatkan isu lingkungan hidup sebagai *headline* mereka.⁶¹

⁶⁰ WALHI, "Sejarah," walhi.or.id, n.d., <https://www.walhi.or.id/sejarah> (diakses pada, 4 Februari 2023).

⁶¹ WALHI.



detikBali

Jumat, 03 Feb 2023 18:10 WIB

Walhi Dkk Tolak Proyek Kereta Gantung di Gunung Rinjani

32 lembaga anggota Walhi di NTB menolak pembangunan kereta gantung Rinjani yang akan dibangun oleh investor China melalui PT Indonesia Lombok Resort.

Gambar 5. 11 Menjadi Headline Berita Lingkungan Hidup

(Sumber: detik.com)

Dalam membangun *solidarity incentive* antar anggota WALHI ini pun dibangun dengan cara menanamkan ideologi gerakan, tujuan, dan pendidikan yang terukur serta terarah sebagaimana yang sudah penulis uraikan dalam pembahasan ideologi dan tujuan. Hal ini pun yang membuat WALHI sebagai salah satu NGO Lingkungan terbesar di Indonesia. Bahwa dalam kesempatan wawancara yang penulis lakukan bersama dengan anggota DPRD DKI Jakarta Komisi D yaitu Hj. Yuke Yurike, S.T., M.M. menyampaikan bahwa:

*“Ketika membahas mengenai NGO Lingkungan maka WALHI merupakan organisasi yang akan diingat pertama kali. Eksistensi WALHI dikenal dan selalu diingat karena organisasi ini secara aktif melakukan komunikasi dengan pemerintah terkait penyampaian kerusakan lingkungan atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan lingkungan”.*⁶²

Lebih dari itu Hj. Yuke Yurike, S.T., M.M. pun menambahkan akan posisi dan citra WALHI di pemerintahan:

*“WALHI sudah seperti mitra pemerintah dalam hal pengawas lingkungan hidup di DKI Jakarta”.*⁶³

⁶² Hasil Wawancara Dengan Hj. Yuke Yurike, S.T., M.M. Selaku Anggota DPRD Komisi D DKI Jakarta.

⁶³ *Ibid.*

Hasil wawancara bersama Hj. Yuke Yurike, S.T., M.M. pun tidak jauh berbeda dengan anggota Lembaga WALHI yaitu LBH Jakarta yang diwakilkan oleh Jihan Fauziah Hamdi, S.H. yang menyatakan bahwa:

*“WALHI sebagai NGO lingkungan mampu dengan baik memberikan bridging kepada pemerintah dalam hal posisi tawar akan permasalahan lingkungan hidup”.*⁶⁴

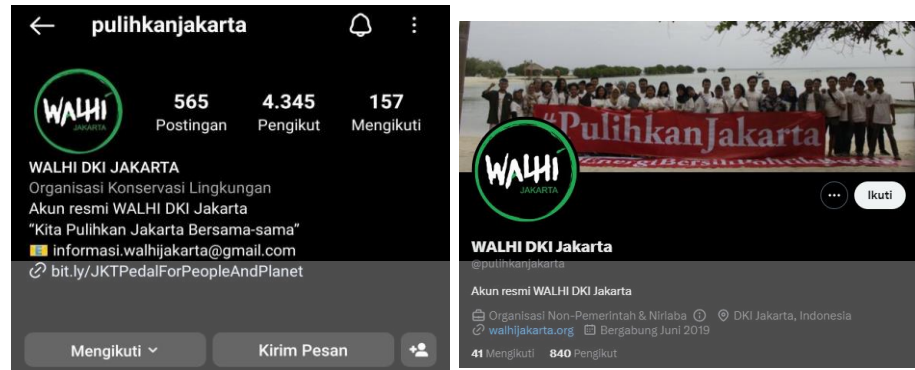
Bisa sampai pada titik tersebut tentunya WALHI memiliki segudang agenda dan juga aksi yang mereka lakukan dengan cakupan bidang mereka yaitu lingkungan hidup yang konsisten. Sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Aminullah selaku perwakilan dari WALHI Jakarta, ia menyampaikan bahwa:

*“Sebagai kelompok kepentingan/kelompok penekan WALHI melakukan aksi intervensi kebijakan yang banyakan bersifat reaksioner terhadap tindakan pemerintah mengenai lingkungan hidup”.*⁶⁵

Aksi intervensi yang bersifat reaksioner tersebut membuat WALHI Jakarta sebagai NGO Lingkungan Indonesia memiliki cakupan update yang selalu baru. Dengan kata lain WALHI Jakarta selalu melakukan pengawasan pada setiap kegiatan pemerintah. intervensi pun tidak melulu dijalankan oleh WALHI Jakarta melalui aksi langsung, media sosial pun dibangun oleh WALHI Jakarta guna memberikan informasi seputar kegiatan, program yang dilakukan kepada masyarakat. WALHI Jakarta pun mengupload hasil kajiannya melalui *website* dalam rangka pemberian *awareness* kepada masyarakat seputar lingkungan hidup.

⁶⁴ Hasil Wawancara Dengan Jihan Fauziah Hamdi, S.H. Selaku Pengacara Publik LBH Jakarta.

⁶⁵ “Hasil Wawancara Dengan Muhammad Aminullah Selaku Anggota Kampanye dan Relasi Media WALHI Jakarta.”



Gambar 5. 12 Media Sosial Sebagai Media Komunikasi



Melalui media ini WALHI Jakarta terhubung dengan masyarakat luas dalam menginformasikan aksi-aksi dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemulihan lingkungan hidup. Melalui media ini pun secara tidak langsung WALHI Jakarta mengajak masyarakat Jakarta untuk dapat berpartisipasi dalam mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang sekiranya menyimpang daripada aturan awalnya. Penyimpangan yang ditujukan tentunya seputar lingkungan hidup.



Gambar 5. 14 Diskusi Terbuka Seputar Lingkungan Hidup

(Sumber: [instagram.com/pulihkanjakarta](https://www.instagram.com/pulihkanjakarta))



Gambar 5. 15 Seruan Aksi

(Sumber: [instagram.com/pulihkanjakarta](https://www.instagram.com/pulihkanjakarta))

Dalam aksi komunikasi bersama pemerintah DKI Jakarta WALHI mengakui bahwa dalam mengawal permasalahan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau WALHI masih belum melakukannya secara maksimal. Gerakan dan jalinan komunikasi yang coba di rajut pun masih menyisipkan Ruang Terbuka Hijau di antara permasalahan Jakarta lainnya seperti polusi, banjir, dan ketersediaan air bersih untuk warga Jakarta. WALHI menyampaikan bahwa pihaknya sedang berusaha menyusun strategi dan juga mempersiapkan data-data gugatan kepada

pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam hal pengadaan Ruang Terbuka Hijau.

2. *Cognitive Liberation*

Pembahasan dalam faktor ini menjelaskan mengenai persepsi yang terbentuk dalam masyarakat akan peluang keberhasilan. Kepercayaan yang besar bahwa mereka akan berhasil maka akan membuat mereka mencoba lebih dalam melakukan gerakan sosial. Dalam konsep ini dapat dipahami dengan sederhana dengan sebelum orang-orang memiliki minat dalam mengambil bagian dalam suatu gerakan, para anggota potensial harus mengembangkan ide bahwa terdapat satu situasi yang mereka pandang tidak adil dan dengan kondisi tersebut dapat diubah dengan tindakan kolektif. Dengan kata lain, mereka harus mengembangkan perasaan satu tidak puas atau kekurangan. Perasaan tidak puas ini mereka Yakini sebagai satu hal yang salah dan mereka memutuskan bahwa tujuan mereka adalah benar serta memiliki keyakinan bahwa solusi dalam permasalahan mereka merupakan permasalahan struktural.

Dalam gerakan sosial yang dijalankan oleh WALHI mereka mendasari gerakan mereka pada ideologi gerakan yaitu pemenuhan lingkungan hidup yang berkeadilan. Situasi yang mereka pandang tidak adil adalah tentang bagaimana pemerintah yang merampas, memaksa, dan mengambil hak dari warga untuk mendapatkan lingkungan yang baik, sehat, dan adil. Persepsi tersebut pun muncul ketika kota sebagai

daerah otonomi tidak memperhatikan kesejahteraan lingkungan bagi masyarakatnya dimana bencana banjir masih menghantui, polusi udara semakin buruk, kualitas air bersih yang sulit didapatkan, dan ancaman tenggelam di depan mata. Perasaan tidak adil yang bersifat struktural tersebut yang coba dibawa dalam gerakan sosial.

Dalam memulai gerakan sosial ini tentunya peran anggota inti organisasi memiliki peran sentral dalam membentuk konsep yang kemudian dapat dipahami oleh orang-orang yang memiliki minat dalam mengambil bagian dalam gerakan tersebut. Hal ini dapat dijelaskan dengan bagaimana WALHI yang saat ini sedang mencoba untuk menyusun konsep dalam gerakan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Aminullah:

“WALHI sendiri dalam melakukan pengawasan melakukan pemetaan akan jumlah luas ruang di DKI Jakarta dan melakukan research akan kepemilikan lahan di DKI Jakarta, lebih jauh pun WALHI melakukan pengawasan melalui RDTR, media, dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai pembangunan”.⁶⁶

Data-data tersebut tentunya dikumpulkan sebagai data pertanggung jawaban yang WALHI keluarkan dalam menjalankan aksinya. selain sebagai data pertanggung jawaban data ini pun kemudian mampu menjadi bukti valid atas pernyataan pemerintah yang mungkin melalui data ini WALHI mampu mematahkan opini publik yang dibangun oleh pemerintah tentang Ruang Terbuka Hijau di Jakarta. Selain itu pun data

⁶⁶ Hasil Wawancara Dengan Muhammad Aminullah Selaku Anggota Kampanye dan Relasi Media WALHI Jakarta.

ini yang kemudian dapat menciptakan rasa percaya pada masyarakat maupun anggota WALHI dalam menjalankan gerakan sosialnya untuk melakukan intervensi terhadap pemerintah.

Selain memiliki konsep dan bukti data yang kuat untuk dijadikan landasan suatu gerakan sosial. Organisasi yang membawa gerakan tersebut pun memiliki pengaruh yang kuat tentang bagaimana anggota maupun masyarakat yang ikut dalam gerakan tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Jihan Fauziah Hamdi, S.H.

*“WALHI merupakan salah satu Organisasi yang cukup lama eksis di Indonesia membuat legalitas organisasi ini pun tidak perlu dipertanyakan lagi untuk kemudian WALHI dijadikan pihak perwakilan masyarakat ke pemerintah tentunya WALHI dapat melakukan hal tersebut”.*⁶⁷

Dengan hal tersebut kepercayaan pada suatu organisasi gerakan sosial pun mengacu pada bagaimana mereka melakukan advokasi seputar isu tersebut secara konsisten sehingga mampu menciptakan ciri khas dari setiap gerakan yang dijalankan. Masyarakat yang mengikuti gerakan lingkungan bersama WALHI pun tentunya lebih mengerucut lagi atau dapat dikatakan pada masyarakat dengan spesifikasi permasalahan lingkungan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Jihan Fauziah Hamdi, S.H.

“Tidak semua orang bisa terpantik emosi & empatinya ketika membicarakan lingkungan hidup. Walaupun sebenarnya masalah lingkungan hidup ini dekat dengan kehidupan kita. Berbeda halnya dengan permasalahan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak. Dengan permasalahan tersebut secara langsung orang yang mendengar hal tersebut akan langsung terpantik emosinya karena paradigma yang

⁶⁷ Hasil Wawancara Dengan Jihan Fauziah Hamdi, S.H. Selaku Pengacara Publik LBH Jakarta.

*dimunculkan adalah anak-anak dan kekerasan seksual sehingga orang tersebut dapat dengan mudah mengklasifikasikan bahwa ini adalah permasalahan hukum dan permasalahan pelanggaran HAM. Dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa isu-isu yang memiliki dimensi sosial politik terkadang bisa lebih cepat memiliki pemicu tentang bagaimana orang tersebut bersikap. Sedangkan dalam lingkup lingkungan tidak semua orang dapat terpacu emosinya. WALHI sendiri memang secara kampanye publik dan secara akseptabilitas dari masyarakat hanya pada kalangan tertentu seperti mahasiswa dengan minat lingkungan yang tinggi (pencinta alam) dan masyarakat yang memiliki atau berbenturan langsung dengan permasalahan lingkungan”.*⁶⁸

Dengan hal tersebut banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam gerakan sosial WALHI ini merupakan masyarakat yang berbenturan secara langsung dengan permasalahan lingkungan. Adapun masyarakat yang bergabung dalam gerakan WALHI seperti forum masyarakat Pancoran Bersatu, forum masyarakat rusunawa marunda merupakan form masyarakat yang tergabung dalam koalisi KOPAJA, komunitas pesisir pulau pari, dan masih banyak gerakan WALHI lainnya yang dipercaya masyarakat sehingga ikut bergabung bersama WALHI.

3. *Political Opportunities*

Dalam pembahasan *political opportunities* milik McAdam ini dapat dipahami bahwa *political opportunities* merupakan kedekatan antar kelompok dengan lingkungan politik yang lebih besar. Dalam konteks ini dapat dipahami dengan semakin besar kelompok dapat Bersatu dengan arena politik maka kemungkinan kelompok tersebut

⁶⁸ Hasil Wawancara Dengan Jihan Fauziah Hamdi, S.H. Selaku Pengacara Publik LBH Jakarta.

dapat melakukan perubahan dalam sistem politik akan semakin besar juga.

Kelompok yang dibahas di sini adalah WALHI, dalam dimensi *political opportunities* ini WALHI sudah mampu dekat dengan lingkungan politik yang besar. Hal ini pun sejalan dengan pernyataan dari Hj. Yuke Yurike, S.T., M.M. selaku anggota DPRD Komisi D yang

menyatakan:

*“WALHI merupakan NGO terkait lingkungan hidup yang mungkin paling populer. Karena kita sendiri kalau membahas lingkungan hidup NGO yang paling kita hafal WALHI walaupun mungkin banyak NGO Lingkungan lainnya. Setiap hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup WALHI selalu diajak, dan kegiatan rapat dengar pendapat pun WALHI selalu dilibatkan”.*⁶⁹

Atas pernyataan tersebut pun dapat dipahami bagaimana WALHI mampu dekat dengan arena politik dan menjadi salah satu NGO Lingkungan yang populer di kalangan pemerintah. Tentunya legitimasi yang didapatkan oleh WALHI ini merupakan satu hal yang sangat baik karena dengan dikenalnya WALHI oleh pemerintah maka saran dan segala bentuk aksi yang dilakukan oleh WALHI akan dengan sangat mudah masuk ke pemerintah.

Namun pada kenyataannya, melalui konsep *political opportunities* ini dapat menjadi konsep yang menjelaskan kekurangan yang terjadi dalam gerakan WALHI. Tentunya mengacu pada konteks peran

⁶⁹ “Hasil Wawancara Dengan Hj. Yuke Yurike, S.T., M.M. Selaku Anggota DPRD Komisi D DKI Jakarta.”

pengawasan WALHI dalam pengadaan Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta, WALHI secara signifikan belum dapat menjalankan perannya dengan maksimal. Hal ini mengacu pada pernyataan Muhammad Aminullah selaku perwakilan anggota WALHI Jakarta yang menjelaskan:

*“Dalam kurun waktu 2017-2021 WALHI belum secara maksimal memainkan peran pengawasan terhadap pengadaan Ruang Terbuka Hijau, karena keterbatasan akses data”.*⁷⁰

Berdasarkan pernyataan Muhammad Aminullah tersebut pun dapat menjelaskan tentang kekurangan dari WALHI. Sebagai NGO yang memiliki relasi dengan pemerintah dan bahkan disebut sebagai ‘partner’ oleh DPRD nyatanya WALHI masih kesulitan dalam mengumpulkan data-data penguat argumentasi gerakannya. Sebagai kelompok penekan, WALHI melakukan pengawasannya melalui kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seperti RDTR dan media. Sumber data tersebut tentunya sangat terbatas walaupun DKI Jakarta merupakan daerah yang memberikan akses pengawasan kepada masyarakat dengan menghadirkan berbagai fitur yang praktis dan dapat diakses dimanapun melalui internet. Data-data tersebut belum mampu membantu WALHI menjalankan gerakannya dalam pengawasan pengadaan Ruang Terbuka Hijau.

⁷⁰ “Hasil Wawancara Dengan Muhammad Aminullah Selaku Anggota Kampanye Dan Relasi Media WALHI Jakarta.”

Kedekatan yang dibicarakan oleh DPRD pun kemudian menghadirkan pertanyaan akan bagaimana *partner* yang dimaksud oleh DPRD tersebut, karena dalam mengakses data-data seputar pembangunan kebijakan saja WALHI sangat sulit mendapatkan akses tersebut. Lalu bagaimana kemudian kelompok penekan ini dapat memainkan perannya secara maksimal sedangkan untuk dapat mengakses data mereka membutuhkan waktu yang lama dengan mengikuti alur birokrasi yang berbelit-belit. Hal ini kemudian yang membuat WALHI dapat menghabiskan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun hanya untuk membuat catatan-catatan terhadap satu kasus lingkungan saja dan proses pelayanan sanksi pun memakan waktu yang lama pula. Efisiensi waktu yang kemudian diharapkan dari memanfaatkan *political opportunities* ini pun menjadi sangat bias.

Tentunya sebagai kelompok penekan WALHI selalu memanfaatkan segala bentuk peluang yang ada seperti menjalin kedekatan secara pribadi kepada aktor pemerintah dengan tujuan dapat mengakses data-data yang dibutuhkan dalam gerakan-gerakannya lebih cepat. Walau pun kesulitan dalam hal pengumpulan data sebagai landasan awal sebuah gerakan/aksi. WALHI sebagai gerakan sosial mampu berperan dengan signifikan, hal ini disampaikan oleh Jihan Fauziah Hamdi, S.H.

“Dalam setiap gerakannya tentu WALHI merupakan NGO yang memiliki peran signifikan karena WALHI merupakan NGO Lingkungan yang memiliki legal standing (kedudukan hukum) yaitu hak gugat. Sehingga jika ditanya seberapa signifikan

*WALHI dapat mempengaruhi kebijakan dan bagaimana lingkungan hidup dapat terjamin adalah dengan WALHI yang memiliki hak gugat (legal standing) hal ini berkaitan dengan masalah izin. Selain itu WALHI merupakan NGO yang memiliki sasaran advokasi yang spesifik dalam lingkungan hidup”.*⁷¹

Legal standing ini merupakan penerjemahan teori Christopher Stone yang menjelaskan bahwa lingkungan perlu memiliki wali (*guardian*). Berdasarkan teori ini menjelaskan mengenai objek alam seperti pepohonan dan objek lainnya walaupun sifatnya imajinatif perlu memiliki hak hukum. Guna menjamin hak hukum tersebut maka kelompok-kelompok yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan ditunjuk sebagai *guardian* dari benda-benda alam dengan sifat imajinatif tersebut.⁷²

Melalui legal standing (hak gugat) ini WALHI dapat menjalankan peran signifikannya dalam permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. Legal standing (hak gugat) sendiri merupakan kedudukan hukum yang dimiliki untuk dapat menggugat. Legal standing ini hadir sebagai hubungan hukum alam yang meliputi hukum antar sesama manusia, dan alam. Pihak yang bisa menjadi legal standing di muka pengadilan bisa individu maupun sekelompok orang/organisasi. Legal standing diterapkan di Indonesia karena prinsip hukum lingkungan Indonesia yang berkonsepkan hak gugat konvensional. Hak gugat konvensional ini berhubungan dengan kehendak orang banyak

⁷¹ Hasil Wawancara Dengan Jihan Fauziah Hamdi, S.H. Selaku Pengacara Publik LBH Jakarta.

⁷² Nommy H.T Siahaan, “Perkembangan Legal Standing Dalam Hukum Lingkungan (Suatu Analisis Yuridis Dalam Public Participatory Untuk Perlindungan Lingkungan),” Syiar Hukum III, no. 3 (1998): hlm, 238.

atau *public interest law*. Legal standing ini dilayangkan oleh pihak yang memiliki syarat untuk dapat bertindak atas dasar kepentingan masyarakat.⁷³

Undang-undang yang mengatur *legal standing* ini adalah UU No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH) dengan dasar hukum pihak yang mengajukan *legal standing* adalah:

1. Hak gugat individu termaktub dalam Pasal 84 ayat (1)
2. Hak gugat masyarakat dengan bentuk *class action* yang termaktub dalam Pasal 91
3. Hak gugat pemerintah termaktub dalam Pasal 90
4. Hak gugat organisasi lingkungan yang termaktub dalam Pasal 92
5. Hak gugat administrasi yang termaktub dalam Pasal 93

Selain kelima point tersebut hak gugat lingkungan hidup untuk LSM/NGO pun termaktub dalam Pasal 92 ayat (1) yang menjelaskan bahwa terbatas, kemudian Pasal 92 ayat (3) dalam UU PLH menjelaskan kriteria LSM yang dapat mengajukan *legal standing* saat memiliki perkara di pengadilan yaitu:

“Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan jika telah memenuhi persyaratan seperti; a) bentuk badan hukum; b) menegaskan bahwa dalam anggaran dasar organisasi ini didirikan untuk kepentingan serta pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan c) sudah melaksanakan kegiatan yang nyata

⁷³ “*Legal Standing Dan Hukum Lingkungan Di Indonesia*,” dslalawfirm, n.d., <https://www.dslalawfirm.com/legal-standing/>.

*berdasarkan pada anggaran dasar dengan kurun waktu dua tahun”.*⁷⁴

WALHI sebagai NGO mampu memenuhi kriteria tersebut seperti halnya tentang badan hukum, WALHI sendiri merupakan badan hukum publik yang berbentuk Yayasan. Hal ini didasarkan pada Suket Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.06-00050005. Walaupun tidak dapat masuk ke arena politik secara langsung WALHI masih dapat berperan aktif dan maksimal dengan legal standing yang dimiliki.

5.2.3 Struktur Mobilisasi

Dalam membahas struktur mobilisasi yang digunakan oleh WALHI Jakarta dalam menjalankan peran pengawasannya dalam konteks pengadaan Ruang Terbuka Hijau. Struktur mobilisasi penulis gunakan karena mengacu pada gerakan sosial McAdam, McCarthy, dan Zald menjelaskan bahwa konsep ini menjelaskan bagaimana keterlibatan WALHI dalam membangun tindakan kolektifnya yang meliputi taktik gerakan, bentuk organisasi gerakan, serta rancangan gerakan sosial. Melalui konsep ini struktur mobilisasi dipahami sebagai wahana tentang bagaimana organisasi melakukan mobilisasi dalam suatu gerakan sosial.

Mobilisasi dapat dipahami sebagai kemampuan orang untuk dapat bergerak secara bebas, mudah, teratur, dan memiliki tujuan dalam rangka pemenuhan kebutuhan menurut KBBI mobilisasi ini merupakan panduan agar gerakan yang

⁷⁴ “Legal Standing Dan Hukum Lingkungan Di Indonesia.”

ingin dijalani bergerak dengan mudah. Dalam konteks peran pengawasan WALHI dalam pengadaan RTH di DKI Jakarta, maka penulis akan menjelaskan bagaimana WALHI mampu menggerakkan organisasinya dalam memanfaatkan efektifitas dan efisiensi waktu aksi.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas oleh penulis bahwa peran WALHI dalam menjalankan peran pengawasannya terhadap Pemprov DKI Jakarta belum maksimal atau secara gambling WALHI belum menyanggol pemerintah DKI Jakarta dengan kalimat RTH 100%. aksi-aksi tersebut masih menyusup dalam beberapa isu utama DKI Jakarta, namun sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Muhammad Aminullah ia menjelaskan bahwa:

*“Aksi RTH memang belum dijalankan secara utuh oleh WALHI karena kami masih menyusun strategi untuk mengadvokasikan isu ini ke pemerintah. Namun, terdapat beberapa aksi RTH yang sudah kami jalani yaitu Jakarta Butuh Pohon Bukan Beton dengan runtutan aksi yang berjalan sampai depan balaikota DKI Jakarta. WALHI Jakarta pun menyerahkan bibit pohon pada balaikota DKI Jakarta sebagai simbol bahwa Jakarta membutuhkan banyak pohon”.*⁷⁵

Aksi Jakarta butuh pohon bukan beton ini dilakukan oleh WALHI Jakarta yang bersifat reaksioner terhadap tindakan pemerintah DKI Jakarta yang melakukan pembangunan revitalisasi kawasan Monas yang mengobarkan ratusan pohon. Arena bekas terbangun pohon tersebut akan dijadikan rencana plaza kolam pantulan bayangan.

⁷⁵ Hasil Wawancara Dengan Muhammad Aminullah Selaku Anggota Kampanye Dan Relasi Media WALHI Jakarta.



Gambar 5. 16 Aksi Jakarta Butuh Pohon Bukan Beton

(Sumber: dokumentasi pribadi WALHI Jakarta)

Atas pembangunan proyek revitalisasi kawasan Monas dengan mengorbankan ratusan pohon didalamnya ini WALHI kaitkan dengan kawasan Monas yang tergenang air pada Jumat, 24 Januari 2020 sebagai dampak dari proyek revitalisasi.⁷⁶ Melalui aksi ini WALHI Jakarta mendesak pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk menghentikan proyek revitalisasi kawasan Monas dan mengembalikan fungsi awal RTH di kawasan tersebut. Dalam gerakan ini mobilisasi yang dilakukan oleh WALHI adalah dengan bergerak bersama Gerakan Peluk Pohon.



Gambar 5. 17 Aksi RTH Balaikota

(Sumber: dokumentasi pribadi WALHI Jakarta)

Aksi ini pun berjalan sampai ke Balaikota DKI Jakarta dengan tujuan memberikan bibit pohon kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta sebagai simbol bahwa Jakarta memerlukan banyak pohon dan agar pemerintah lebih

⁷⁶ WALHI, "Jakarta Butuh Pohon Bukan Beton!," 2020, <https://www.walhi.or.id/jakarta-butuh-pohon-bukan-beton>.

banyak menanam lebih banyak pohon dibandingkan beton. Secara langsung WALHI pun meminta pemerintah DKI Jakarta untuk dapat melakukan upaya terhadap pemenuhan RTH DKI Jakarta.⁷⁷

Mobilisasi aksi selanjutnya adalah dengan membentuk koalisi dalam aksi gerakan ekologisnya. Melalui Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA) WALHI dan para anggota lembaganya melayangkan kartu merah kepada pemerintah Anies Baswedan atas kinerja buruknya untuk menyelesaikan permasalahan ekologi di DKI Jakarta. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Jihan Fauziah Hamdi, S.H. sebagai salah satu perwakilan Lembaga anggota WALHI yaitu LBH Jakarta menjelaskan bahwa:

*“Koalisi ini lebih pada mengingatkan Anies akan janji politiknya dan pada akhir kepemimpinannya Anies dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sudah ia janjikan pada kampanye yang lalu”.*⁷⁸

Dengan permasalahan tersebut koalisi ini pun melayangkan 11 tuntutan yaitu buruknya permasalahan kualitas polusi udara, permasalahan konsentrasi air, permasalahan penanganan banjir, masalah akses bantuan hukum bagi warga, masalah masyarakat pesisir dan pulau kecil di Jakarta seperti reklamasi, hunian layak, penggusuran paksa, dan penanganan covid-19 yang bermasalah.

⁷⁷ WALHI.

⁷⁸ Hasil Wawancara Dengan Jihan Fauziah Hamdi, S.H. Selaku Pengacara Publik LBH Jakarta.



Gambar 5. 18 Koalisi Kopaja

(Sumber: liputan6.com)

Dalam menjalani koalisi ini WALHI dan LBH Jakarta serta berbagai elemen yang ikut dalam koalisi ini secara bersama-sama untuk dapat menangani sejumlah permasalahan yang diangkat. Tidak hanya permasalahan lingkungan yang kemudian diangkat namun hak asasi manusia pun dijunjung dalam koalisi ini. Sehingga dalam gerakan ini lebih pada bantuan bagi warga Jakarta yang terdampak pengusuran paksa yang mana forum masyarakat pun ikut bergabung dalam koalisi ini misalnya forum pancoran Bersatu yang bergabung, forum masyarakat rusunawa marunda yang terdampak batu bara di wilayah Utara Jakarta pun bergabung dalam koalisi ini.

Koalisi dibentuk untuk dapat menangani kasus-kasus yang sedemikian rupa, fokus kajian dan penanganan dibagi kepada anggota lembaga yang memiliki kapasitas dalam penanganan isu. Seperti masalah akses terhadap bantuan hukum, pengusuran paksa akan dipimpin oleh LBH Jakarta. Sedangkan WALHI Jakarta akan berfokus pada reklamasi, pulau-pulau kecil, dan permasalahan air. Dengan hal tersebut fungsi anggota lembaga dari WALHI Jakarta ini untuk dapat menajamkan gerakan WALHI sehingga kemudian gerakan yang diangkat mampu dipertanggungjawabkan ketika ada

keadaan dimana mereka harus maju ke persidangan untuk memperjuangkan hak-hak dari masyarakat.

Koalisi merupakan taktik yang digunakan oleh WALHI agar gerakan yang ia jalankan mampu menangani permasalahan lingkungan yang memiliki dimensi yang luas seperti pelanggaran HAM, Kesehatan, dan masih banyak lainnya. Sehingga dalam membentuk anggotanya pun WALHI berkolaborasi dengan Lembaga hukum dan kajian lingkungan lainnya. Hal ini dilakukan untuk dapat memperkuat strategi advokasi WALHI dalam rangka memperjuangkan keadilan ekologi bagi masyarakat.

Point utama dalam bagaimana hasil dari struktur mobilisasi yang dijalankan oleh WALHI apakah mampu memaksimalkan perannya dalam signifikansi kenaikan jumlah RTH di DKI Jakarta. Jika dilihat secara umum WALHI dengan sigap dan *update* menjalankan perannya dengan baik sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Aminullah bahwa gerakan WALHI bersifat reaksioner. Hal tersebut mengindikasikan bahwa WALHI selalu mengawasi pemerintah, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh penulis di atas bahwa diperlukan waktu yang matang untuk WALHI menjalankan aksinya dan juga data-data yang dikumpulkan memiliki dimensi kesulitannya masing-masing. Seperti halnya RTH jumlah rill RTH DKI saja belum dapat diketahui dengan pasti lalu bagaimana WALHI dapat melayangkan gugatan kepada pemerintah jika mereka tidak memiliki data tersebut.

Sehingga hal ini yang membuat peran WALHI belum maksimal dalam rangka memperjuangkan pengadaan 30% RTH di DKI Jakarta. Namun secara struktur mobilisasi yang dibangun WALHI sudah sangat baik karena perencanaan yang matang dengan strategi yang tepat mampu membawa kemenangan untuk WALHI.

